



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4 Jakarta 10710 – Indonesia
Telepon.3500901; Fax. 3521967

**NOTULEN RAPAT TRANSPARANSI COMMODITY
TRADING**

Hari/Tanggal : Selasa, 12 September 2017
Waktu : 13:30 – 15.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Lt 4, Gedung Ali Wardhana, Kemenko
Perekonomian.

A. PEMBUKAAN

Rapat dibuka oleh Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian, Bpk Ahmad Bastian Halim. Menyampaikan bahwa rapat Commodity Trading ini adalah rapat yang kedua setelah rapat pertama dihadiri oleh konsultan Johnny West. Rapat untuk mendapat masukan dari Civil Society Organization (CSO), Pertamina, dan pihak-pihak lainnya.

B. PEMAPARAN

Bpk Edi Tedjakusuma (Sekretariat EITI):

- Indonesia diminta menjadi negara pilot transparansi commodity trading bersama beberapa negara lainnya. Diharapkan transparansi Commodity Trading ini akan berguna bagi Indonesia.
- Inception report telah disampaikan di rapat Tim Pelaksana EITI pada bulan Agustus dan telah dikirimkan ke seluruh stakeholder untuk mendapatkan masukan. Masukan yang sudah ada dari CSO dan dari SKK Migas walaupun pendapatnya agak berbeda. Kita menjembatani apakah Inception Report tersebut untuk ditindaklanjuti. Menurut CSO Inception Report dari konsultan Open Oil (Johnny West) sudah cukup baik untuk diadopsi oleh Indonesia termasuk rekomendasi impor. Di sisi lain dulu waktu rapat pertama telah disepakati bahwa yang akan dibuka hanya bagian pemerintah saja dan tak mencakup impor. Kami menanyakan rekan-rekan apakah hal ini bisa diakomodir atau tidak? Masih ada yang ragu-ragu seperti dari SKK Migas masih menunggu tanggapan dari Pertamina. Kami meminta tanggapan dari CSO, Pertamina, SKK dan rekan-rekan yang lain.

Bpk Aryanto (CSO Publish What You Pay):

- Secara umum akan kami sampaikan masukan CSO terhadap Inception Report dari konsultan. Sebelumnya kami sudah mengusulkan untuk mengundang KPK dari Korsup Migas dan mantan Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Pak Faisal Basri untuk ikut diundang untuk memperkaya diskusi, termasuk memberikan rekomendasi. Tapi kami belum tahu pertimbangan apa sehingga belum diundang oleh Sekretariat EITI.
- Secara umum ada 11 rekomendasi, secara umum telah memberikan bentuk ideal dari transparansi Commodity Trading. Secara umum CSO sepakat dengan usulan Johnny West seperti perubahan ruang lingkup. Dalam diskusi terlebih dulu hanya menyepakati hanya migas dan ekspor. Melihat Inception Report jadi menarik untuk memasukkan impor karena ekspor dari bagian pemerintah kita sangat kecil seperti hanya 1 kargo kapal. Apakah transparansi 1 kargo kapal menunjukkan gambaran Commodity Trading. Kalau itu saja yang dibuka, kita seperti menyembunyikan sesuatu. Ini juga sesuai rekomendasi dari Tim Reformasi tata Kelola Migas, jadi mekanisme data impor harus dibuka.
- Pembukaan praktik penjualan minyak bumi harus dibuka seperti mekanisme dan seller. Lebih baik dibuka. Mekanisme tender juga
- Untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih baik dapat melibatkan instansi lain seperti Kemendag dan BPS.

Bpk Musfadillah (SKK Migas):

- Kami akan menjelaskan beberapa masukan. Untuk reporting cycle konsultan merekomendasikan 12 bulan, kami mengusulkan agar 24 bulan saja karena akan lebih efektif.
- Apakah definisi dari first trade?
- Masukan untuk nomor 6, Untuk trading partner selection apakah dapat dibuka Pertamina?
- Masukan nomor 8, Untuk produksi minyak mentah telah menurun sesuai SKK Migas sebagai regulator? Kami ingin menanyakan angka tahun berapa untuk total lifting tersebut?

C. DISKUSI

Bpk Edi:

- Untuk reporting cycle lebih baik disamakan dengan laporan EITI yaitu paling lambat 24 bulan dari tahun berjalan.
- Untuk data di Standar memang bagian pemerintah (in kind) walaupun sebenarnya akan lebih baik kalau dapat dibuka semua.
- Untuk data impor agar dibuka, SKK tergantung Pertamina.

Bpk Nyoman Sueta (Pertamina):

- Terkait pembukaan data, pada prinsipnya data-data semuanya melewati Corporate Secretary untuk menentukan mana yang bisa diberikan atau tidak misal data ke DPR atau BPH Migas. Biasanya melalui Corporate Secretary kecuali kalau pemberian data sudah dilakukan secara rutin, dapat dilakukan secara langsung. Tapi itu informal, formalnya lewat Corporate Secretary.

- Untuk proses penjualan, rekanan tak pernah mengeluh tentang fairness. Kalau ada aturan-aturan yang baru sudah kita diskusikan dengan KPK, Kejagung.

Ibu Jelita (Pertamina)

- Sebenarnya semua datanya termasuk ekspor dan impor apakah akan dimasukkan semua. Sebenarnya data impor telah ada di Kemenkeu. Kalau datanya sudah ada di Kemenkeu apakah akan direct ke Kemenkeu. Untuk impor dan ekspor juga telah kita berikan ke DJ Migas juga ada beberapa data yang ada di BI. Jadi mana saja yang akan dibuka untuk EITI?

Bpk Edi: EITI adalah standar transparansi global, sehingga tiap tahun Indonesia harus membuka data untuk direkonsiliasi dan untuk perbaikan tata kelola. Standarnya berkembang terus, commodity trading masih belum ada sehingga masih pilot. Kira-kira data apa saja yang bisa dibuka dan bermanfaat bagi masyarakat. Menurut CSO, kalau ekspor saja yang dibuka seperti belum menggambarkan Commodity Trading secara umum. Karena masih pilot, ini akan dipakai sebagai standar berdasarkan pilot dari beberapa negara. Jadi apakah bisa dibuka? Tapi apakah kalau dibuka akan mengganggu perusahaan?

Ibu Jelita: Data sudah ada tapi kadang berbeda karena perbedaan cutting waktu pelaporan.

Bpk Edi: Apakah boleh dibuka? Kalau boleh dibuka tinggal ditentukan sumbernya dari mana.

Ibu Dita (Pertamina): Kami sebenarnya terbuka untuk strategi lelang, seperti peserta tender siapa. Tapi untuk pemenang dan harga sepertinya tidak boleh dibuka. Ibu Jelita: Karena legnya 24 bulan dari tahun berjalan, seharusnya sudah dapat diketahui pemenangnya dengan mengetahui siapa kontraktor/supliernya.

Bpk Edi: Apakah disepakati atau tidak?

Ibu Jelita: Sebenarnya data sudah ada, kalau mau diambil dari masing-masing kementerian/lembaga.

Bpk Nyoman: Kalau menyampaikan data, juga harus memperhatikan sensitivitas. Data memang ada di kementerian, tapi bukan untuk publik. Kekawatiran kita apabila digunakan untuk politis. Kecuali kalau dibuka secara umum tak detail itu tak akan menjadi masalah.

Bpk Edi: Seharusnya memang apple to apple, jadi tak hanya Pertamina yang dibuka. Semua perusahaan juga.

Bpk Aryanto: Untuk EITI semua perusahaan memang dituntut membuka pembayaran ke negara, misal pajak di Exxon, BP dll. Tapi sekarang masih piloting. Jadi kami ingin mengetahui bagian manakah yang dianggap sensitif. Misalkan mekanisme harusnya bisa dibuka. Yang belum disepakati hanya di level kedalaman transparansi.

Bpk Robby (DJ Anggaran): Saya khawatir diskusi kali ini tidak fokus. Yang perlu digarisbawahi harusnya fokus ke ekspor dan bagian pemerintah. Kalau ingin fokus ke perdagangan bagian pemerintah fokus disitu saja. Mungkin ekspor kecil, tapi pemakaian di dalam negeri besar. Yang jadi pilot kan beberapa negara, kita batasi saja. Jadi kita harus melihat negara lain juga, kita bisa evaluasi kekurangan kita. Jadi itu yang harus dibatasi sehingga nantinya saat pelaksanaan tak ada perselisihan. Apakah konsultan Johnny West bekerja untuk Indonesia saja atau dengan negara yang lain? Jadi harus ada pertimbangan juga dengan pelaksanaan di negara lain.

Bpk Firzal (DJ Perimbangan Keuangan): Kami dipanggil Pak Wamen Kemenkeu untuk mencari tahu mengenai penentuan negara dari migas. Apakah ini sudah bisa dipublish? Karena ini keluar dari pemerintah? Dan di RDP dengan DPR terbuka. Padahal menurut SKK Migas data adalah confidential.

Bpk Edi: Menurut SKK confidential, mungkin pertimbangannya mengganggu kompetisi. Kembali ke Pertamina, apakah kalau dibuka ini mengganggu kompetisi? Kalau di DPR memang sering ditanya wartawan, jadinya juga kadang-kadang jadi terbuka. Jadi kembali ke Bapak/Ibu apakah impor bisa dibuka? Menurut Pak Robby yang dibuka ekspor dan pemakaian dalam negeri. Kalau seperti itu mungkin Pertamina tak keberatan.

Ibu Runi (SKK Migas): Tanggapan SKK no 9. SKK menganggap confidential karena kita berpendapat kontrak melibatkan 2 pihak. Jadi kita keberatan karena ada perbedaan harga dll

Bpk Nyoman: Kita fokus ke bagian pemerintah saja. Kita punya kompetitor juga apabila Pertamina buka yang lain tidak. Kalau memang harus dibuka seharusnya jangan terlalu detil, misal harga HPS dilempar ke masyarakat dan di media, bisa merepotkan. Kalau dibuka di DPR atau internal pemerintah tidak apa-apa.

Ibu Jelita: Untuk pilot, lebih baik fokus ke ekspor dulu dan bagian pemerintah. Kalau untuk impor, apabila buyer yang lain, selain Pertamina juga setuju, nanti kita diskusikan lagi untuk impor.

Bpk Adijanto (DJ Perbendaharaan): Lebih baik jangan terburu-buru. Harus didiskusikan di high level. Teman-teman disini belum tentu bisa mewakili perusahaan. Jadi harus lebih hati-hati.

Bpk Aryanto: Belum jelas disisi mana yang keberatan karena belum ada tanggapan resmi detil poin per poin. Yang belum kita sepakat level kedalaman. Perlu di-challenge pembukaan penggunaan di dalam negeri. Yang belum sepakat kita di level kedetilan data yang dibuka. Sepertinya kita belum punya persepsi yang sama tentang commodity trading ini.

Bpk Robby: Salah satu yang kita bicarakan dengan Johnny West adalah first trade. Kalau first trade, harusnya sudah selesai di Pertamina. Kalau di step ke dua sudah bukan first trade lagi. Jadi apakah first trade itu? Karena Pertamina adalah satu-satunya entitas yang pegang bagian pemerintah. Kalau hanya first trade, ya berhenti di level Pertamina. Kalau sudah siapa pembelinya, itu sudah bukan first trade.

Bpk Aryanto: Kalau first trade seperti itu tak menarik dan kurang menggambarkan commodity trading.

Bpk Robby: memang kenyataannya seperti itu.

Bpk Nyoman: Setahu saya yang bukan Pertamina hanya yang di Bojonegoro.

Bpk Edi : Jadi definisinya yaitu yang bagian pemerintah dibeli Pertamina dan apabila yang tak cocok diekspor.

Bpk Aryanto: Harusnya first trade itu tak hanya yang dijual SKK dibeli Pertamina.

Bpk Robby: Kalau lebih kebawah lagi, itu bukan hanya first trade. Kita juga harus melihat pilot di negara lain juga.

Bpk Nyoman: Pertamina hanya penjual saja.

Bpk Musfadillah (SKK Migas): First trade itu tetap antara SKK dengan Pertamina, bukan dengan buyer.

Ibu Jelita: Jadi perdagangan antara Pertamina dan buyer adalah second trade.

Bpk Aryanto: Persepsi orang dari SKK ke Pertamina hanya perpindahan tangan. Itu seperti bukan haknya trader, hanya haknya Pertamina di first trade. Publik ingin tahu model mekanisme trading di Pertamina.

Bpk Robby: Mungkin yang harus kita jelaskan mekanismenya saja.

Bpk Aryanto: Apakah SKK menjual atau menunjuk sebagai penjual ke Pertamina.

Bpk Robby: kalau penjual akan mendapat fee setelah verifikasi. Kalau dalam hal ini tak bisa diserap Pertamina maka Pertamina akan jadi penjual. Jadi Pertamina merupakan entitas bisnis, sebagai buyer dan apabila tak bisa menyerap akan menjualkan. Mereka akan serap dulu sebagai buyer, apabila tak bisa menyerap akan menjualkan.

Bpk Edi: Mungkin yang diserap Pertamina dan yang dijualkan Pertamina. Itu mungkin first tradenya.

Ibu Jelita: First trade itu SKK ke Pertamina. Karena Pertamina juga menanggung resiko. Sebelum menjualkan, Pertamina harus serap dulu.

Bpk Aryanto: Kenapa dulu SKK boleh jual langsung dan sekarang pindah ke Pertamina? Pasti ada latar belakangnya. Salah satunya karena kasus BP Migas. Ketika SKK tak bisa menjual langsung, harusnya transparan saja apa perbaikannya.

Bpk Edi: Yang mau kita buka misal bagian pemerintah 700 yang diserap Pertamina 500 dan yang 200 kemudian dijualkan Pertamina untuk pemerintah. Apakah angka-angka itu bisa dibuka?

Bpk Robby: Itu seperti simpel, tapi nilai itulah yang masuk ke penerimaan negara.

Bpk Aryanto: Kalau hanya seperti itu dari SKK ke Pertamina, tak perlu ada transparansi Commodity Trading.

Bpk Edi: Menurut saya kalau mekanisme misal SKK menjual ke Pertamina 700 yang 200 dijualkan apakah itu bisa dibuka? Walaupun yang 200 tak masuk ke Pemerintah lagi. Yang pertama masuk ke Pemerintah 700 itu dengan harga ICP.

Ibu Jelita: 700 masuk SKK. Kalau yang dijualkan atau tak terserap itu bisa rugi atau kurang dari harga ICP. Pertamina harus membayar ke pemerintah dengan harga ICP.

Bpk Robby: Bisa kurang/lebih ICP, tapi entitasnya dia-dia juga. Sampai Pertamina menjual pihak ketiga akan dibuka tidak?

Bpk Edi: Itu bukan first trade, tapi masuk ke pemerintah juga. Kalau rugi Pertamina rugi, kalau untung dapat fee.

SKK Migas: Kami hanya di first trade dengan Pertamina. Setelah itu bukan wewenang kami. Kita harus melihat juga competitiveness. Kalau terlalu terbuka ditakutkan mempengaruhi iklim usaha. Sementara pemerintah sedang mengejar investasi.

Bpk Robby: Ini sudah Pertamina dengan pihak lain. Apakah pihak tersebut mau. Kalau dituntut? Lebih baik Pertamina baca kontrak dulu apakah bisa dibuka atau tidak.

Bpk Aryanto: Pertamina adalah badan publik, jadi harus dilihat mana yang bisa dibuka atau tidak.

Bpk Edi: Pertamina juga memiliki bisnis dengan entitas yang lain. Kalau memang ada dasarnya tak bisa dibuka ya tidak apa-apa. Tapi yang akan dibuka apakah hanya yang 700 atau juga termasuk 200 yang dengan entitas lain? Menurut CSO kalau yang 700 tak menarik karena hanya SKK dan Pertamina. Tapi yang 200 kalau ada kerahasiaan kontrak tak bisa dibuka. Untuk impor sementara ini belum bisa dibuka? Kecuali nanti ada perkembangan baru. Misalkan negara lainnya juga buka impor.

Ibu Jelita: Apakah kita akan nambah dari first trade, karena untuk yang 200 tadi bukanlah first trade. Kalau menambah second trade, mohon dijelaskan benefitnya apa bagi publik dan dapat terukur. Kalau ada benefit yang terukur, nanti kita lihat lagi.

Bpk Aryanto: Nanti akan kami siapkan benefit keterbukaan second trade. Tapi kami juga meminta argumen kenapa second trade itu tertutup.

Ibu Jelita: Lebih baik kita di first trade. Apakah negara lain juga membuka first trade? Dan apa benefitnya untuk Indonesia.

Bpk Edi: Apakah tata kelola dari penjualan first trade itu sudah benar?

Ibu Jelita: Berarti harus menambah scope?

Bpk Aryanto: Memang harus menambah scope, karena kalau hanya SKK ke Pertamina hanya begitu saja.

Bpk Adijanto: yang penting memenuhi report dulu.

Bpk Aryanto: Report bertujuan untuk perbaikan tata kelola di akhirnya. Report hanya sarana.

Bpk Edi: Kita piloting dan nantinya dipakai untuk seluruh negara. First trade harus dilaporkan. Mungkin yang second trade mekanismenya saja. Mungkin itu dulu, mekanismenya itu sebagai perbaikan. Kita hanya meyakinkan Pertamina melakukan tender dll. Yang 200 itu ditender dengan rumusan tertentu. Jangan-jangan rumusannya salah. Yang penting mekanismenya. Karena yang ingin kita capai perbaikan tata kelola. Bagaimana kalau seperti itu?

Bpk Nyoman: kalau seperti itu bisa dilakukan.

Bpk Aryanto: Harus dibuka volume, tender, pemenangnya siapa. Kalau keberatan argumennya apa?

Bpk Edi: yang sekarang bisa disepakati adalah first trade antara Pemerintah dan Pertamina dan policy penjualan bagian pemerintah tersebut. Dan saya yakin yang lainnya teman-teman disini belum bisa membuat keputusan disini.

Bpk Aryanto: Sepemahaman saya SKK menjual bagian pemerintah. Harus ditunjukkan regulasi tersebut.

Bpk Edi: Tata kelolanya saja disampaikan. Kita sepakat first trade dari SKK ke Pertamina. Dan ditunjukkan dasar hukumnya bagaimana.

Bpk Nyoman: Sepakat, kita memutuskan first trade adalah dari SKK ke Pertamina. Ditunjukkan mekanisme untuk second trade. Untuk penjualan dari SKK ke Pertamina perlu ditunjukkan dasar hukumnya dan tata kelolanya.

Bpk Edi: Itu sementara dulu, kecuali untuk second trade mungkin bisa. Kalau yang impor tidak ya?

Bpk Aryanto: Untuk posisi CSO tetap maunya dibuka, Pertamina dan SKK tidak tinggal dituliskan di berita acara.

D. KESIMPULAN

1. Keputusan rapat yang dibuka hanya data first trade antara SKK Migas dan Pertamina. Untuk second trade (yang tak bisa diserap Pertamina) hanya ditunjukkan mekanisme dan tata kelolanya. Dasar hukum penjualan dari SKK Migas ke Pertamina juga harus ditunjukkan di laporan.
2. Data second trade dimungkinkan bisa dibuka. Untuk pembukaan second trade harus dilihat yang tercantum di kontrak antara Pertamina dan buyer. CSO akan menunjukkan benefit apa bagi publik tentang pembukaan second trade dan Pertamina akan menunjukkan argumen kenapa second trade tak bisa dibuka.
3. Untuk data impor, SKK dan Pertamina tak mau membuka sedangkan CSO tetap pada pendiriannya untuk pembukaan impor.
4. Rapat Tim Pelaksana EITI untuk membahas draft final laporan Commodity Trading pada tanggal 3 Oktober 2017. Pertamina diharapkan memberikan tanggapan pada scoping dari konsultan, Johnny West karena mungkin ada perbedaan persepsi dengan Pertamina.